

Masyarakat Tombang Berharap Pembangunan Infrastruktur

PASBAR - SINGGALANG

Masyarakat Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, berharap perhatian dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Wilayah yang dihuni oleh 262 Kepala Keluarga (KK) ini masih menghadapi tantangan besar terkait akses jalan yang masih terbatas dan fasilitas dasar lainnya.

Sardi Usman Dt Rajo Mudo, salah seorang tokoh masyarakat setempat, mengatakan bahwa kondisi infrastruktur di Tombang memerlukan perhatian baik dari Pemda melalui dinas terkait serta anggota DPRD yang ada, terutama terkait pembangunan jalan dan jembatan.

"Masyarakat kami sangat membutuhkan perbaikan jalan dan jembatan agar dapat mempermudah mobilitas dan aktivitas sehari-hari," kata Sardi kepada Singgalang, Kamis (17/10).

Menurutnya, jarak yang cukup jauh dari pusat kecamatan, dengan jarak, sekitar 15 kilometer, ditambah dengan kondisi jalan yang belum memadai, membuat masyarakat Tombang semakin merasa terisolasi. Akses transportasi yang terbatas sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

"Kami sangat berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk membangun infrastruktur yang memadai," tam bahnya.



BURUK - Beginilah kondisi akses jalan dan jembatan yang buruk menuju Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Pasbar. (arafat)

Selain perbaikan jalan, Sardi juga menyoroti pentingnya dukungan untuk sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat Tombang bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, lanjutnya, kondisi jalan yang buruk membuat distribusi hasil pertanian menjadi sulit, yang pada akhirnya

mempengaruhi pendapatan petani setempat.

"Kami berharap ada dukungan untuk pertanian yang lebih baik, agar hasil pertanian bisa dijual dengan harga yang layak dan mudah diakses," ungkapnya.

Keinginan masyarakat Tombang ini bukan tanpa alasan. Mereka sangat menyadari bah-

wa pembangunan infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, memperlancar perekonomian, dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan publik.

"Kami ingin anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh, dan kami ingin bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah," jelasnya.

Masyarakat Tombang, sebagian besar berprofesi sebagai petani, juga berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Hal ini sangat penting untuk mengangkat taraf hidup mereka, yang selama ini tergolong rendah akibat terbatasnya akses dan fasilitas yang ada.

Ia juga menambahkan, jika pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap wilayah ini, bukan hanya masalah infrastruktur yang akan teratasi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun kondisi wilayah Tombang masih jauh dari harapan, masyarakat tetap optimis jika ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

"Kami berharap ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah yang akan datang. Dengan adanya perhatian dan kebijakan yang tepat, kami yakin Tombang bisa berkembang dan sejahtera seperti daerah lainnya," ulasnya.

(arafat)

DPRD Sumbar-MUI Berkolaborasi Tindaklanjuti Berbagai Persoalan Sosial

Padang, Singgalang

Guna mengoptimalkan penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, DPRD Sumbar menyatakan akan mengaktifkan kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar.

Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan saat pertemuan silaturahmi pimpinan DPRD Sumbar bersama ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, Rabu (16/10) di kantor MUI Sumbar.

Saat pertemuan itu, Ketua MUI Gusrizal Gazahar menyampaikan harapan agar ke depan kerja sama antara pemerintah daerah dan MUI bisa lebih dioptimalkan. Ia juga mengatakan MUI selalu bersedia untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat.

"Banyak persoalan sosial yang harus ditindaklanjuti secara bersama-sama, salah satunya terkait angka LGBT yang cukup tinggi di provinsi ini," ujarnya.

Selain itu, Gusrizal juga menyampaikan tentang MUI yang sudah dua tahun tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD Sumbar untuk bantuan biaya



BERSAMA - Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar bersama unsur pimpinan lainnya, saat silaturahmi memperkuat kolaborasi kedua lembaga. (ist)

operasional. Selain itu pemerintah daerah yang sudah tidak lagi melibatkan MUI pada rapat-rapat resmi dengan dinas-dinas lainnya. Sementara di lain sisi persoalan-persoalan sosial terus terjadi di tengah masyarakat.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, hukum adat perlu kembali diberlakukan. Salah satunya, hukum adat untuk hukuman kepada pelaku penyuka sesama jenis dan pelaku perzinahan.

"Hukuman adat seperti ini bisa membuat jera," katanya.

Ia juga menyampaikan, beberapa waktu lalu, MUI Sumbar mengadakan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil). Salah satu hasil rapat itu yakni berupa sejumlah rekomendasi, diantaranya, ulama harusnya mendap-

atkan hak untuk menguji pemahaman filosofis adat basandi syarak-Ssyarak basandi kita bullah (ABS-SBK) pemimpin daerah.

Lalu, MUI berupaya menjaga

masjid sebagai simbol warga Sumbar dan harus ada panduan penggunaan masjid raya Sumbar.

Selanjutnya, koordinasi pemerintah daerah harus optimal dengan MUI yakni pertemuan harusnya dibuat berkala bukan hanya insidental.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengungkapkan, pihaknya akan mengawal dana untuk biaya operasional MUI dalam pembahasan komposisi APBD 2025 yang akan segera dilaksanakan.

DPRD Sumbar juga siap berkolaborasi dengan MUI Sumbar untuk kepentingan yang lebih luas. "Berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditindaklanjuti bersama-sama," katanya.

Muhidi menjelaskan, kunjungan ke MUI Sumbar merupakan agenda silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di Sumbar untuk mengawali masa jabatan periode 2024-2029.

"Optimalisasi pembangunan daerah dari segala sektor, harus menjangkau seluruh unsur," katanya. (401)

PLN Raih Penghargaan dari Local Media Summit 2024

JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali meraih penghargaan dalam kategori Perusahaan Pendukung Media Lokal dalam ajang Local Media Summit (LMS) 2024. Penghargaan ini diperoleh PLN untuk kedua kalinya berkat konsistensinya dalam mendukung perkembangan media lokal di seluruh Indonesia.

Pemimpin Redaksi suara.com, Suwarjono mengatakan, LMS 2024 yang dihelat suara.com dan International Media Support (IMS) menilai PLN konsisten mendukung perkembangan media lokal.

"PLN terus meningkatkan kualitas konten dan media yang sehat secara bisnis. PLN juga konsisten mendukung Local media forum_ dan meningkatkan kapasitas baik bidang konten, bisnis, distribusi, teknologi dan monetisasi," kata Suwarjono dalam acara Local Media Summit 2024 dengan tema "Technological Transformation in Local Media: Serving The Audience of Tomorrow".

Mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo,



BERSAMA MEDIA - Para awak media ketika mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang berkapasitas 140 megawatt (MW) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PLN secara konsisten mendukung perkembangan media di seluruh tanah air, baik media berskala nasional maupun media berskala lokal. (ist)

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, pihaknya mengapresiasi peran media lokal yang mempunyai keunikan, karakteristik daerah dan sumber-sumber berita yang banyak sekali.

"Kami sangat mengapresiasi suara.com yang konsisten mendukung media lokal. Bagi kami, media lokal memiliki karakteristik yang khas di

setiap daerah, terlebih dengan adanya unit-unit PLN di seluruh penjuru tanah air. Ini menjadi bentuk simbiosis mutualisme, di mana media mendapatkan akses berita, sementara PLN memperoleh dukungan publikasi untuk layanan kami," ujar Gregorius.

Untuk itu, Gregorius memastikan PLN akan terus mendukung perkembangan media lokal dengan kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi penting

dalam membantu mengkomunikasikan informasi maupun potensi-potensi lokal yang terkait dengan PLN.

"Selama ini, hubungan antara PLN dan media lokal terjalin dengan sangat kolaboratif. Pemberitaan mengenai PLN pun tersebar luas dan masif, berkat dukungan yang berkelanjutan dari media," ujar Gregorius imbuhnya.

Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap media, PLN setiap tahun menyelenggarakan ajang PLN Journalist Award 2024 bagi para jurnalis di seluruh Indonesia. Gregorius juga mengundang para jurnalis untuk berpartisipasi dengan mengirimkan karya-karya terbaiknya.

"Batas pendaftaran PLN Journalist Award 2024 adalah hingga 31 Oktober 2024. Kami mengundang rekan-rekan media untuk dapat berpartisipasi. Ini adalah ajang penghargaan bagi jurnalis, baik lokal maupun nasional untuk terus meningkatkan kemampuan dan berkompetisi secara sehat," pungkasnya. (105)

Cegah Pekat, Rangkul Berbagai Elemen Masyarakat

BUKITTINGGI - Komitmen bersama antara masyarakat, aparat penegak hukum, TNI-Polri dan pemerintah kota adalah suatu kunci untuk menekan dan mencegah penyakit masyarakat (pekat), seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, LGBT dan lainnya.

Pekat harus dikurangi, setidaknya diminimalisir bahkan diupayakan untuk dihilangkan di Kota Bukittinggi. Makanya, Pjs Walikota Hani Syopiar Rustam menginstruksikan dinas terkait bergandengan tangan dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi Pekat di Kota Jam Gadang ini.

"Semua elemen masyarakat dan stakeholder harus bersatu dan membulatkan tekad perang terhadap pekat. Tindakan represif perlu dilakukan, preventif kita maksimalkan. Intensifkan penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku," tegasnya di hadapan kepala dinas terkait, tokoh masyarakat, TNI-Polri dan undangan lainnya di Balai Kota Bukik Gulai Bancah, Rabu (16/10).

Sejak 2018 hingga September 2024, katanya, pada daerah tujuan wisata genear dilakukan tes HIV. Dari hasil pemeriksaan itu, jumlah kasus HIV dominan bersarang pada kaum lelaki dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah penderita HIV banyak ditemukan pada kelompok risiko LGBT.

"Seyogyanya pembatasan gerak, penting dilakukan. Saat ini, dinas terkait sedang memetakan dan menyusun 'action plan'. Kita akan mengupayakan agar Kemenkominfo RI dapat memblokir permanen aplikasi yang memfasilitasi tindakan yang mengarah pada penyakit masyarakat, termasuk judi online. Kita tutup peluang mereka. Kasihan generasi muda kita," ujar Pjs Walikota Bukittinggi itu. (as)



KOMIT - Pjs Walikota Bukittinggi Hani Syopiar Rustam bersama berbagai elemen masyarakat menguatkan komitmen guna mencegah penyakit masyarakat.

Jeju Air Buka Penerbangan Langsung Incheon Korsel - Batam

BATAM - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendukung penuh dalam merealisasikan penerbangan langsung dari Bandar Udara Incheon di Korea Selatan menuju Bandara Hang Nadim di Batam (PP).

"Penerbangan perdana ini merupakan bagian integral dari terselenggaranya proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Plt. Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam sambutannya saat menerima kedatangan Jeju Air, Rabu (16/10) malam di Bandara Hang Nadim, Batam.

"Kami berharap dengan dibukanya rute penerbangan ini dapat meningkatkan kedatangan wisatawan, investasi dan perdagangan, serta mempererat pertukaran budaya antar negara," ujar Lukman.

Dikatakan, penerbangan Incheon-Hang Nadim Batam (PP) ini beroperasi menggunakan pesawat jenis B737-800 yang dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas maksimum 189 penumpang, dengan jadwal penerbangan 3 kali dalam seminggu.

Lukman memberikan apresiasi kepada semua pihak atas dukungan sehingga penerbangan langsung Incheon-Hang Nadim Batam (PP) ini dapat beroperasi.

Menurutnya, rute penerbangan ini diharapkan sustainable serta menguntungkan bagi kedua negara maupun operator penerbangan dalam meningkatkan aksesibilitas, mendorong kedatangan wisatawan, investasi, dan perdagangan, serta mempererat pertukaran budaya antara kedua negara. (602)

DPRD Sumbar Terima Kunker Komisi I DPRD Bungo

PADANG - Ingin mempelajari tentang tata perizinan dan pelayanan di Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Kabupaten Bungo, Jambi kunjungi DPRD Sumbar, Rabu (16/10).

Kedatangan mereka disambut tim ahli DPRD Sumbar, Nasir Ahmad. Turut hadir pula kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumbar.

Ketua Komisi I DPRD Bungo, Dedi Hardani mengatakan perihal tata perizinan dan pelayanan merupakan lingkup kerja Komisi I. Kabupaten ini sedang melakukan upaya pengefektifan dan pengoptimalan perizinan dan pelayanan, sehingga diperlukan banyak informasi dan pelajaran dari berbagai provinsi lain.

"Sebagai referensi untuk kabupaten Bungo, kami menjadikan Sumbar sebagai salah satu percontohan. Untuk itulah kami datang melakukan kunjungan kerja ini," ujar Dedi.

Tim pakar DPRD Sumbar, Nasir Ahmad saat pertemuan tersebut mengatakan, pemerintahan daerah dan DPRD telah lama dan terus berupaya mengoptimalkan tata perizinan dan pelayanan.

Untuk itulah mengapa dibuat dinas yang bisa menjadi one stop way atau tempat perhentian satu tempat untuk mengurus perihal perizinan dan pelayanan di Sumbar. Dengan begitu sistem perizinan dan pelayanan akan lebih mudah.

"Kemudahan perizinan salah satunya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi calon penanam modal atau calon pengusaha untuk berinvestasi di Sumbar," katanya.

Ia mengatakan secara langsung maupun tidak langsung, kemudahan perizinan dan pelayanan di pemerintah daerah terkait tentu berpengaruh pada banyaknya investasi atau penanaman modal di sebuah daerah. Hal ini mesti menjadi perhatian pemerintah daerah terkait.

Selain itu, menurut dia, regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik Kabupaten, kota maupun provinsi, perlu dipahami agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Saat pertemuan perwakilan DPMPPTSP Sumbar juga memberikan keterangan tentang regulasi dan peraturan terkait tata perizinan dan pelayanan di Sumbar. Termasuk pengaruhnya terhadap jumlah penanaman modal di Sumbar. (401)



TERIMA KUNJUNGAN - DPRD Sumbar menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Bungo, Rabu (16/10). (ist)



AMANKAN - Tim gabungan pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat (PAKEM) saat mengamankan sejumlah warga negara asing yang diduga menyebarkan aliran sesat. (ist)

DIDUGA SEBARKAN ALIRAN SESAT

Tujuh WNA Diamankan

PASBAR - SINGGALANG

Tim gabungan pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat (PAKEM) Kabupaten Pasaman Barat mengamankan tujuh warga negara asing (WNA) yang diduga menyebarkan aliran sesat di daerah itu terkait Imam Mahdi.

"Tim gabungan menemukan sebanyak tujuh orang warga negara asing yang tinggal di Wisma Bancah Tarok, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingsuang Aua Timur, Kecamatan Pasaman pada Rabu (16/10)," kata Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, Ka-

mis (17/10).

Menurutnya, tujuh orang WNA yang ditemukan itu terdiri dari enam orang berkebangsaan Inggris dan satu orang dari Norwegia. "Mereka memiliki dokumen administrasi yang sah berdasarkan paspor yang dimilikinya, namun memiliki tujuan yang sesat," katanya.

Ketujuh orang itu adalah AK (6), Priya Kurji (37), MAS (1), KJ (3), Krillan (39), Sn (8) yang merupakan warga negara Inggris dan Osama (35) warga negara Norwegia.

Ketika ditanyakan terkait tujuan keberadaannya, seorang WNA atas nama Osama mengatakan tujuannya ke Indonesia atau Pasaman Barat untuk membiat Muhammad Qosim yang saat ini masih berada di Jakarta untuk dijadikan sebagai Imam Mahdi.

Hal itu dijelaskannya berdasar mimpinya yang bertemu dengan Allah SWT dan diperintahkan untuk membiat Muhammad Qosim untuk menjadi Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam. "Untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif, maka para WNA ini telah dibawa ke kantor Imigrasi Kabupaten Agam oleh petugas Imigrasi," katanya. Camat Pasaman Andre Afandi menyampaikan bahwa saat ini tim gabungan masih terus memantau informasi mengenai rencana kedatangan Muhammad Qosim yang informasinya merupakan warga negara Pakistan dan akan dibaiat oleh Osama.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap orang yang tidak dikenal apalagi telah

membawa kepercayaan baru apalagi sesat. "Kalau hal itu dijumpai, silakan laporkan kepada pemerintah setempat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," sebutnya.

Sedangkan terhadap warga yang telah memberikan fasilitas tempat tinggal WNA ini rencananya akan diberikan ceramah agama oleh petugas dari kantor Kementerian Agama Pasaman Barat agar apa yang mungkin telah diterimanya beberapa hari belakangan mengenai kepercayaan ini bisa kembali lurus.

"Mereka telah berada di Pasaman Barat sekitar satu pekan lamanya. Tentu ini tugas dari Kemenag lagi untuk memberikan ceramah agama kepada warga kita yang mungkin banyak sedikitnya telah terparap oleh aliran kepercayaan tersebut," harapnya. (108)

DUGAAN KORUPSI DI DINAS PENDIDIKAN SUMBAR

Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa

Padang, Singgalang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menangkis eksepsi penasihat hukum (PH) terdakwa kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan Sumbar dalam sidang yang digelar Kamis (17/10) di Pengadilan Negeri Padang.

JPU menegaskan proses penyidikan telah sesuai dengan hukum. "Dan semua sudah ada dalam dakwaan," kata JPU, Pitria.

JPU juga menyebutkan, surat dakwaan telah disusun secara cermat. Sehingga eksepsi PH terdakwa telah masuk pada pokok materil.

Kemudian JPU meminta kepada majelis hakim agar menolak eksepsi PH terdakwa, menyatakan dakwaan telah JPU telah sesuai, dan melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa.



SIDANG - Proses persidangan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (17/10). (ist)

Sidang yang diketuai oleh Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, didampingi hakim anggota Juandra dan Hendri Joni, dilanjutkan pada 22 Oktober 2024, dengan agenda putusan sela.

Pada sidang sebelumnya, JPU dalam dakwaan menyebutkan, kasus ini berawal saat Disdik Provinsi Sumbar melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK dengan sumber anggaran

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp18,07 miliar.

Anggaran kemudian ditukan untuk pengadaan empat paket pengadaan, yaitu untuk sektor industri dengan pagu anggaran Rp4,4 miliar, paket pengadaan sektor ketahanan pangan sebesar Rp4,8 miliar, paket pengadaan sektor kemaritiman sebesar Rp1,6 miliar dan paket sektor pariwisata dengan pagu anggaran Rp7,2 miliar.

JPU menyebutkan, perbantuan dari para terdakwa ini diketahui telah merugikan negara sebesar Rp.5,52 miliar. Ketujuh terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ini yaitu Syaiful Abrar, Rusli Ardion, Raymond, Doni Rahmat, Suherwin, Erika dan Syarifuddin. (wy)

BPI KPNPA RI SUMBAR DUKUNG APARAT LAKUKAN PEMERIKSAAN

Perjalanan Dinas Anggota DPRD Pd.Pariaman Diduga Fiktif

Pd.Pariaman, Singgalang

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan belanja perjalanan dinas sebesar Rp61.923.651.585,00 untuk tahun 2023.

Belanja perjalanan dinas ini terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. BPK RI melakukan pemeriksaan atas realisasi belanja perjalanan dinas untuk menguji pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas berupa kelengkapan administrasi pertanggungjawaban/hasil realisasi kegiatan perjalanan dinas.

Pada hasil pemeriksaan BPK RI, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 2023 terdapat kondisi pembayaran uang perjalanan dinas yang tidak senyatanya sebesar Rp1.468.410.800,00. dengan rincian; kelebihan pembayaran biaya penginapan kepada Kepala Pelaksana Perjalanan Dinas yang terkonfirmasi tidak menginap sebesar Rp107.105.800,00.

Kemudian, kelebihan pemba-

yan biaya penginapan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak sesuai biaya rill penginapan dan jumlah hari menginap sebesar Rp1.361.305.000,00.

Di samping itu, hal ini juga mengakibatkan belanja barang dan jasa dalam LRS tidak akurat sebesar Rp1.468.410.800,00 dan kelebihan pembayaran biaya penginapan sebesar Rp955.981.600,00.

Ketua DPW Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Marlis, M.M. menyatakan hal ini melanggar Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perjalanan Dinas Jaba dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip: selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabel serta peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kelebihan pembayaran

uang perjalanan dinas ini adalah bentuk ketidakjujuran para oknum Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam menggunakan uang Negara yang sebagaimana mestinya.

Untuk itu, BPI KPNPA RI Sumbar meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk segera memulai proses pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas dari Pelaksana Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp955.981.600,00 paling lambat 60 hari setelah LHP BPK RI 2023 ditetapkan, sesuai dengan ketentuan," ujar Marlis.

Sebelumnya, berdasarkan LHP BPK RI 2022, hal yang sama juga turut terjadi kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretaris DPRD pada Tahun 2022 sebesar Rp220.610.705,82 dan belum disetorkan ke Kas Daerah. Dan tentunya kasus ini sudah termasuk perbuatan pidana korupsi, karena telah melewati jangka waktu yang

ditentukan. Maka hal ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

"Kelebihan pembayaran yang belum disetorkan hingga saat ini ke Kas Daerah tersebut tentu sudah merupakan tindak pidana korupsi. Kami mendorong Aparat Penegak Hukum berwenang untuk memeriksa dan memproses kelebihan tersebut untuk ditindaklanjuti secara hukum semestinya," imbuh Marlis.

Marlis turut menambahkan, temuan di LHP BPK RI 2023 sebagaimana yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ini, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain di Provinsi Sumatera Barat, serta juga di Indonesia. Maka untuk itu, BPI KPNPA RI Sumbar berharap dan menyampaikan permohonan kepada seluruh anggota DPRD, baik Kab./Kota maupun Provinsi Sumatera Barat betul-betul menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. (rel)

PLN Tingkatkan Keandalan dengan Batutuah Abih

DHARMASRAYA - PLN konsisten lakukan berbagai skema penguatan keandalan listrik demi memastikan kualitas suplai listrik kepada masyarakat.

Batutuah Abih atau singkatan dari "PerBAikan KonsTruksi dan EksekUsi Temuan GanggUAn PoHon dAn Blnatang untuk keHandalan listrik" menjadi salah satu program penguatan keandalan listrik di unit-unit kerja di PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat.

Melalui program ini, PLN berkolaborasi bersama Sub Holding, anak perusahaan, ataupun stakeholder dan masyarakat terkait untuk melakukan berbagai kegiatan pemeliharaan jaringan listrik.

Terbaru, PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok gelar Batutuah Abih untuk memperbaiki konstruksi dan menangani gangguan pohon serta hewan liar di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

Bersama PLN Halyora Power Area Layanan Solok dan masyarakat setempat, tim Batutuah Abih ini gotong royong dengan membawa berbagai perlengkapan kerja menuju lokasi Nagari Silago yang terbilang jauh dan ekstrem.

Selang dua hari, semangat tim yang tidak surut dalam menuntaskan tugas penguatan keandalan akhirnya tuntas membuahkan hasil. jaringan listrik yang rusak dan terkendala oleh gangguan pohon dan hewan liar gangguan akhirnya pulih kembali.

Wali Nagari Silago Muhammad Ramli sampaikan apresiasinya kepada PLN. Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan dan warganya pada Batutuah Abih yang baru saja berlalu menjadi contoh konkret bagaimana sinergi akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kepentingan bersama.

"Terima kasih atas kepedulian dan dukungan penuh dari PLN pada penyaluran listrik ke seluruh warga kami, bahkan hingga yang berada di pelosok nagari. Kolaborasi kemaren menyadarkan kerja keras Bapak-Bapak dalam melistriki negeri, saya sangat mengapresiasi, dan kami siap mendukung pekerjaan PLN. Jaya terus PLN UID Sumbar," lanjutnya.

PLN UP3 Solok juga rutin memberikan edukasi kepada masyarakat perihal dampak negatif dari pembiaran pohon yang mengenai jaringan listrik PLN. Manager PLN UP3 Solok Abdul Azis mengatakan, pohon yang berjarak terlalu dekat dengan jaringan PLN tidak hanya dapat mengganggu keberlangsungan pasokan listrik dan merusak aset PLN, tetapi juga berpotensi menyebabkan korsleting listrik hingga bahaya listrik lainnya.

"Kami terus menginformasikan kepada masyarakat, apabila menemukan pohon yang berdekatan dengan jaringan atau melihat jarak antara dahan pohon dan listrik kurang dari 3 meter, dapat segera melaporkan ke petugas melalui Aplikasi PLN Mobile," jelas Rudi kemudian. (105)



PENGUATAN KEANDALAN - PLN lakukan penguatan keandalan listrik demi memastikan kualitas suplai listrik kepada masyarakat dengan program Batutuah Abih. (ist)

Komisi II DPRD Sumbar Rapat Perdana dengan Mitra Kerja

PADANG - Komisi II DPRD Sumbar melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja, Kamis (17/10). Rapat tersebut menjadi rapat perdana pasca telah diresmikannya susunan komisi-komisi DPRD Sumbar 10 September lalu.

Dalam rapat tersebut seluruh mitra kerja yang merupakan organisasi perangkat daerah sektor perekonomian diminta memaparkan berbagai hal terkait program kerja tahunan, termasuk realisasinya hingga kendala yang dihadapi.

Wakil Ketua Komisi II, Ilson Chong mengatakan lingkup kerja Komisi II yakni sektor perekonomian. Diantaranya meliputi perihwal perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan.

"Ini merupakan rapat perdana selain membahas program kerja, realisasi dan kendala yang dihadapi dinas terkait tentu ini juga menjadi perkenalan dewan dewan baru periode Tahun 2024-2029 dengan OPD terkait," ujarnya.

Ia mengatakan pasca telah dilaksanakannya rapat tersebut, unsur pimpinan dan anggota-anggota komisi II menjadi memiliki informasi yang perlu ditindaklanjuti pada rapat internal. Komisi II, tambah dia, juga akan mencari berbagai informasi lainnya dari berbagai sumber untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Ia juga mengatakan, program dan kegiatan yang menjadi pembahasan bersama mitra kerja difokuskan pada Triwulan III dan IV tahun 2024. Hal ini mengingat akhir tahun anggaran akan segera berakhir dan hanya tersisa sekitar dua bulan lagi untuk merealisasikan seluruh program yang terdapat pada APBD.

"Rapat ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan koordinasi serta mendukung pelaksanaan program-program strategis di Sumbar," ujar Ilson Cong.

Untuk diketahui, pada rapat kerja perdana Komisi II ini diantaranya Dinas Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertran, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Biro Perekonomian.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Ilson Cong dihadiri Sekretaris Komisi II, Varel Oriano dan sejumlah anggota komisi II. (401)



RAKER - Rapat kerja perdana Komisi II DPRD Sumbar bersama OPD-OPD mitra kerja, Kamis (17/10) di gedung DPRD Sumbar. (ist)



PLAKAT

Pj. Walikota Padang, Andree Algamar berikan plakat kepada Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik saat audiensi ke rumah dinas walikota. (kominfo)

Khalil Chaniago Serap Aspirasi Masyarakat

PADANG - Anggota DPRD Padang, Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil Chaniago, kembali mencuri perhatian dengan aksi sosialnya.

Dalam masa reses sidang I tahun 2024, politisi muda ini tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, namun juga secara aktif menyalurkan bantuan langsung kepada konstituennya. Melalui kegiatan reses yang digelar di beberapa titik di daerah pemilihannya, seperti Kurao, Sungai Sapih, dan Lapau Bajuang Gunung Sarik, Khalil berhasil menjangkau langsung masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan serta harapan mereka. Mulai dari kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur seperti rumah ibadah dan jalan lingkungan, semua aspirasi tersebut dicatat dengan saksama oleh Khalil.

Namun, yang paling menonjol dari kegiatan reses Khalil kali ini adalah komitmennya untuk menyisihkan 50% gajinya sebagai anggota dewan untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya para lansia. Tindakan nyata ini dilakukannya sebagai bentuk terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya.

"Saya sudah berjanji, selama 5 tahun masa jabatan saya ini, saya akan menyumbangkan 50 persen gaji saya untuk membantu masyarakat di luar dari dana pokok pikiran dewan," ujar Khalil saat dihubungi, Rabu (16/10).

Dalam reses kali ini, Khalil telah membagikan 500 paket sembako pada para lansia kurang mampu dan tidak memiliki suami di daerah pemilihannya. "Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup mereka dan memberikan sedikit kebahagiaan," tambahnya.

Tindakan Khalil Chaniago ini tentu patut diapresiasi dan menjadi teladan bagi para wakil rakyat lainnya. Dengan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kepentingan masyarakat, Khalil telah menunjukkan bahwa seorang wakil rakyat tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

"Saya dipilih oleh rakyat tanpa modal besar menjadi wakil rakyat, jadi saya benar-benar harus berguna bagi rakyat yang telah memilih saya," ucapnya lagi.

Sementara itu, Wati warga Kurao yang menerima paket sembako dari Khalil sangat bersyukur dan berterimakasih. Dirinya juga mengatakan kerap mendapatkan bantuan dari Khalil sebelum menjadi anggota DPRD Kota Padang.

"Sebelum duduk jadi anggota DPRD Padang pun dia sering peduli pada ibu-ibu apalagi lansia di daerah Kurao ini. Kami sangat terbantu dengan kehadiran Khalil, mudahan dirinya bisa menjadi penyambung lidah masyarakat memperjuangkan warga kurang mampu," katanya. (105)



RESES - Anggota DPRD Padang Muhammad Khalidi Al Khair saat melaksanakan reses menjemput aspirasi masyarakat. (ist)

Pemko Kolaborasi dengan Basarnas, Gelar Latihan Gabungan Kebencanaan

PADANG - SINGGALANG

Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) akan saling berkolaborasi dalam menggelar latihan gabungan kebencanaan.

Latihan gabungan kebencanaan itu akan dilaksanakan di Lapangan Balaikota Padang dan Pantai Padang pada 30-31 Oktober 2024. Latihan diselenggarakan Basarnas Kota Padang yang berkolaborasi dengan Pemko Padang melalui BPBD Kota Padang.

Kegiatan tersebut juga akan melibatkan personel dari TNI serta lebih dari 750 personel Basarnas yang berasal dari Kota Padang dan beberapa daerah lain di Sumbar.

Fokus latihan adalah pada

simulasi penyelamatan dari berbagai jenis bencana, baik di darat maupun laut, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan potensi Megathrust Mentawai.

Penjabat (Pj) Walikota Padang, Andree Algamar saat audiensi dengan Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik di ruang VIP rumah dinas walikota menyambut positif rencana latihan tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah prioritas utama di wilayah yang rentan seperti Padang.

"Kota Padang berada di zona yang sangat rawan bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga banjir akibat cuaca ekstrem. Dengan latihan gabungan ini, kami bisa meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi, termasuk TNI dan Basarnas, agar lebih tanggap dalam menghadapi

situasi bencana. Potensi Megathrust Mentawai adalah isu besar yang harus kita hadapi bersama, dan latihan ini merupakan bagian penting dari langkah antisipasi kita," ujar Andree Algamar didampingi Kepala Pelaksana BPBD Padang Hendri Zulvito, Kamis (17/10).

Dia juga menambahkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Latihan gabungan kebencanaan ini tidak hanya untuk personel teknis tapi juga untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kesiapsiagaan bencana.

Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulvito menyebut, latihan gabungan kebencanaan ini akan memperkuat keterampilan teknis dan juga menguji seberapa baik koordinasi antara BPBD, SAR, TNI, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan bencana.

"Mengingat kondisi geografis dan ancaman bencana yang nyata di Kota Padang, kita harus selalu siap dengan langkah-langkah yang tepat dan cepat," kata Hendri Zulvito.

Kepala SAR Padang Abdul Malik menjelaskan terkait pentingnya latihan tersebut dalam memastikan kesiapan operasional di lapangan. Simulasi akan mencakup berbagai skenario penyelamatan di darat dan laut, dengan optimalisasi penggunaan peralatan canggih.

"Latihan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan personel kami, tetapi juga memererat kerja sama dengan TNI dan BPBD. Kami akan memfokuskan simulasi pada penyelamatan manusia dalam berbagai kondisi, baik di wilayah perkotaan maupun pesisir. Dengan latihan ini, kami berharap respons terhadap bencana bisa lebih cepat dan efisien," katanya. (109)

PARIWARA

SILATURAHMI PIMPINAN DPRD SUMBAR DAN KAJATI

Perlu Edukasi Hukum untuk Tekan Angka Kenakalan Remaja

PADANG - SINGGALANG

Awali masa kerja periode 2024-2029, unsur pimpinan DPRD Sumbar bersilaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, Selasa (15/10). Kunjungan ini disambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Yuni Daru Winarsih, Selasa (15/10).

Saat pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal-hal strategis yang berkaitan dengan edukasi hukum untuk menekan angka kenakalan remaja.

Ketua DPRD, Muhidi mengungkapkan, perlu upaya-upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja yang menjadi persoalan pada saat sekarang, salah satunya memberikan pemahaman hukum.

Terkait edukasi Hukum, Kajati Sumbar akan menggarap program 'Jaksa Mengajar'. Untuk optimalisasi kegiatan ini DPRD Sumbar siap mendukung



ng dengan anggaran atau dengan kebutuhan lainnya. Program ini diharapkan bisa memberikan ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal lain yang disebutkan unsur pimpinan DPRD dalam pertemuan tersebut diantaranya terkait pembangunan daerah.

Selain itu gagasan Kajati untuk menciptakan masyarakat sadar hukum akan menjadi



catatan penting DPRD Sumbar untuk didiskusikan lebih lanjut.

DPRD nantinya akan menggelar pertemuan yang lebih formal untuk membahas program edukasi hukum dengan sasaran siswa dan siswi SMA/SMK.

Wakil Ketua DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, kenakalan remaja terutama tawuran telah menjadi persoalan sosial yang meresahkan masyarakat.

"Perlu langkah-langkah konkret untuk menghentikan kenakalan tersebut, salah satunya edukasi hukum ke sekolah-sekolah. Pelaku tawuran bahkan kadang ada anak yang pintar secara akademik, namun karena pengaruh sekitar, mereka ikut terjebak pengaruh negatif kenakalan remaja," katanya

Sementara itu, Kajati Sumbar Yuni Daru Winarsih men-

but adalah Jaksa Masuk Sekolah yang telah digagas Kejati Sumbar.

"Kegiatan itu sudah lama, namun terkendala anggaran yang terbatas, dan hanya dianggarkan untuk enam sekolah. Rencananya kita akan membuat program lainnya yaitu Jaksa Mengajar yang akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dari SMA hingga perguruan tinggi," paparnya.

Dalam program ini, bantunya para Jaksa akan mengajar mata pelajaran tertentu, terkait edukasi Hukum dalam rangka pencegahan awal pelanggaran hukum oleh generasi muda.

Untuk diketahui, saat kunjungan tersebut hadir empat unsur pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD Muhidi dan tiga Wakil DPRD Sumbar Evi Yandri, Igra Chissa dan Nanda Satria. Turut mendampingi sekretariat DPRD, yakni plt sekwan Ismelda Jenraini dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar Zardi Syahrir. (1)

